

ABSTRAK

INTERVENSI POLITIK DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

Oleh

ALAM PATRIA

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan tentang intervensi politik dan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilukada Provinsi Lampung tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teori intervensi politik dari Azhari dan faktor intervensi oleh Hellden, serta teori netralitas birokrasi dari Weber. Metode yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penelitian pustaka dan dokumentasi, kemudian data tersebut diolah sehingga menghasilkan data berupa pemaparan tentang intervensi politik serta netralitas aparatur sipil negara dalam pemilukada di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi politik dilakukan oleh aktor politik yaitu *incumbent* dalam bentuk pengerahan satuan kerja serta jaringan birokrasi, menyisipkan agenda politik dalam kegiatan birokrasi. Netralitas aparatur sipil negara pada beberapa daerah yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat tidaklah terjaga sebagaimana mestinya, keempat kabupaten atau kota ini merupakan asal dari beberapa pasangan calon. Aparatur sipil Negara

dilibatkan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah, selain itu primordialisme politik juga menjadi faktor terjadinya intervensi, intervensi politik juga bisa berasal dari dalam birokrasi, tindakan intervensi kerap dilakukan karena peraturan yang ada belum mampu mengikat secara utuh pelanggar yang melakukan kecurangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dengan melibatkan dukungan aparatur sipil negara merupakan tindakan yang bersifat terbuka dan setengah terbuka. Lembaga pengawas kurang memaksimalkan fungsi pengawasannya, dilihat dari pelanggaran yang terjadi dan laporan pelanggaran yang tidak terproses secara maksimal.

Kata Kunci: Intervensi Politik, Netralitas, Aparatur Sipil Negara, dan Pemilukada.